



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/6/TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH DAN ANTAR
DAERAH MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KESATU TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Dan Antar Daerah Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Rumusan Hasil Kerja Koordinasi Dan Komunikasi tersebut telah disusun yang selanjutnya disampaikan dan dilaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Laporan Hasil Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah dan Antar Daerah Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ketujuh Masa Persidangan Ke-II Tahun Kesatu tanggal 21 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN KOMUNIKASI DALAM DAERAH DAN ANTAR DAERAH MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN KESATU TAHUN 2025 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. |
| KESATU | : Laporan Hasil Koordinasi dan Komunikasi Dalam Daerah Dan Antar Daerah Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu Tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini. |

- KEDUA : Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar memberikan jawaban/penjelasan secara tertulis atas rumusan yang tercantum dalam lampiran tersebut pada diktum KESATU diatas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

